

Pers Rilis

Pembubaran dan Tindakan Represif Aksi Masa Pematang Bedaro

Kamis, 20 Juli 2023 terjadi pembubaran paksa terhadap aksi masyarakat Dusun Pematang Bedaro, Desa Teluk Raya, Kecamatan Kumpeh Ulu yang melakukan aksi pemblokiran jalan masuk menuju PT. FPIL (Fajar Pematang Indah Lestari). Aksi ini dilakukan oleh ratusan masyarakat yang mayoritas emak-emak ini dilakukan sebagai bentuk protes masyarakat terhadap konflik lahan yang dialami oleh masyarakat Dusun Pematang Bedaro dengan PT. FPIL selama 25 tahun yang berbuntut ditahannya 5 orang masyarakat dengan tuduhan pencurian sawit pada tanggal 3 Juli 2023 oleh Polda Jambi.

Kepolisian Daerah Jambi membubarkan paksa masa aksi yang kurang lebih dua minggu telah menduduki jalan dan pintu masuk PT. Fajar Pematang Indah Lestari. Masa aksi yang terdiri dari ibu - ibu , bapak – bapak dan anak anak diangkut paksa ke POLDA Jambi, dari rekaman video terdengar dengan jelas untuk mengambil tindakan tegas, borgol, tidak ada diskusi dan penyampaian bahwa sudah ada himbauan.

Dalam aksi ini diketahui ratusan aparat kepolisian disiagakan untuk menghadapi dan membubarkan masyarakat yang melakukan aksi. Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan, 29 orang masyarakat yang terdiri dari 7 orang perempuan dan 2 diantaranya anak-anak ditahan di Polda Jambi. Selain pengkapan, informasi yang didapatkan di lapangan juga terjadi tindakan represif yang brutal juga dilakukan aparat kepolisian kepada masyarakat peserta aksi. Nunung, salah satu peserta aksi harus dirawat di ICU salah satu rumah sakit Jambi dikarenakan menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan trauma.

Permasalahan ini muncul sejak perusahaan perkebunan sawit yang sebelumnya adalah PT. Purnama Tusau Putra menjanjikan pola kemitraan dan masyarakat Sebanyak 237 KK menyerahkan lahannya kepada PT. FPIL dijanjikan mendapatkan luasan lahan kemitraan 2 hektar. Namun sampai saat ini tidak ada realisasi pola kemitraan hingga perusahaan berganti manajemen dan kepemilikan.

Proses penanganan konflik yang terjadi menemui jalan buntu, tidak ada kesepakatan yang dibangun dengan tujuan mencari solusi untuk mengurai konflik, karena kepentingan atas investasi dan citra baik dalam investasi masih menjadi target utama pemerintah Provinsi Jambi, masyarakat yang menuntut dan menyuarkan hak – hak nya dianggap sebagai batu sandungan dan pengganggu iklim investasi, sawit yang merupakan salah satu komoditas unggulan Provinsi Jambi lagi – lagi menjadi Penyebab konflik yang terjadi.

Peristiwa ini menambah catatan buruk penangan konflik di sektor perkebunan yang ada di Provinsi Jambi, peran pemerintah yang diharapkan menjadi penengah dan solutif tidak efektif karena tidak ada ragam dalam pola penyelesaian konflik yang mengarah pada proses penyelesaian dan juga arogansi dalam menangani konflik, dengan dalih pelanggaran hukum, menghalangi aktivitas perusahaan dan tidak lagi melihat dan mengkaji duduk persoalan.

Pelibatan aparat keamanan dalam Konflik Sumber Daya Alam dimulai sejak nasionalisasi aset pemerintah Indonesia pada masa orde baru, hal ini dapat dilihat sampai sekarang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2013 Tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri tahun 2013 , dijelaskan dalam INPRES tersebut Dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional, dengan ini menginstruksikan: Pada point pertama yaitu Meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

INPRES ini yang menjadi alat legitimasi bagi aparat keamanan untuk melakukan tindakan – tindakan represif dalam setiap konflik sumber daya alam yang ada, tidak jarang kita lihat di Media Massa dan Media Sosial bagaimana aparat keamanan melakukan tindakan diluar kewenangannya sebagai pengamanan.

Dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kemanusiaan WALHI Jambi mendesak:

1. Mendesak Polda Jambi menindak tegas personel yang melakukan tindakan kekerasan kepada massa aksi dengan tindakan hukum.
2. Mendesak Polda Jambi untuk menghentikan penahanan dan kriminalisasi terhadap masyarakat Dusun Pematang Bedaro yang memperjuangkan haknya atas PT. FPIL.
3. Mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk turun ke lapangan dan memastikan tidak dilanggarnya kembali hak asasi rakyat
4. Mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolda Jambi dan Kapolres Muaro Jambi atas tindakan pembubaran masa aksi dan penangkapan masa aksi yang tidak melakukan tindakan anarkis dan perusakan.
5. Mendesak Polda Jambi untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat berupa materil dan non materil.
6. Mendesak Polri bertanggung jawab dan melakukan penindakan tegas terhadap aparat yang melakukan tindakan represif kepada massa aksi hingga dirawat di ICU.

Narahubung:

1. Abdullah (Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi) : 08117454744
2. Eko Mulia Utomo (Manajer Advokasi WALHI Jambi) : 085266481838